

ANTESEDEN *VALUE FOR MONEY* PADA KINERJA KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Muhammad Zaki Auzan¹
Djoko Setyadi²
Irwansyah³**

Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman^{1,2,3}
muhammadzakiauzan@feb.unmul.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi terhadap kinerja keuangan berbasis *Value for Money* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Metode analisis menggunakan aplikasi PLS-SEM 4.0 yaitu menganalisis data primer yang diperoleh melalui survei yang dilakukan kepada responden di Badan Pendapatan Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan berbasis *Value for Money*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas di Badan Pendapatan Daerah, semakin baik kinerja keuangan yang dicapai. Transparansi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan berbasis *Value for Money*, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, semakin baik kinerja keuangan yang dapat dicapai. Selain itu, partisipasi juga ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan berbasis *Value for Money*. Partisipasi yang aktif dari semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dapat meningkatkan kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah. Namun terakhir pengawasan tidak memiliki pengaruh positif atau tidak signifikan ini disebabkan kurangnya beberapa aspek seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi pengawasan serta Ketidakmampuan atau kurangnya kemauan untuk melakukan tindakan yang diperlukan di Badan Pendapatan Daerah, semakin baik kinerja keuangan yang dapat dicapai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan berbasis *Value for Money* di Badan Pendapatan Daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi manajemen Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan partisipasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Value for Money*, Kinerja Keuangan, Badan Pendapatan Daerah Kaltim.

ABSTRACT

This study aims to investigate the effect of accountability, transparency, oversight, and participation on value-for-money-based financial performance in the Regional Revenue Agency of East Kalimantan Province. This study uses a

quantitative approach with the method of analysis using the PLS-SEM 4.0 application, namely analyzing primary data obtained through a survey conducted on respondents at the Regional Revenue Agency. The results of the analysis show that accountability has a positive and significant impact on value-for-money-based financial performance. This shows that the higher the level of accountability in the Regional Revenue Agency, the better the financial performance achieved. Transparency also has a positive and significant effect on value-for-money-based financial performance, indicating that the higher the level of transparency, the better the financial performance that can be achieved. In addition, participation was also found to have a positive and significant impact on value-for-money-based financial performance. Active participation from all related parties, both internal and external, can improve the financial performance of the Regional Revenue Agency. But finally, supervision does not have a positive or insignificant effect, this is due to a lack of several aspects such as limited Human Resources who have supervisory competence and the inability or lack of willingness to take the necessary actions at the Regional Revenue Agency, the better the financial performance that can be achieved. This research makes an important contribution to strengthening the understanding of the factors that influence value-for-money-based financial performance in Regional Revenue Agencies. The results of this study can become the basis for the management of the Regional Revenue Agency to improve accountability, transparency, supervision, and participation to improve sustainable financial performance

Keywords: *Value for Money; Financial performance; East Kalimantan Regional Revenue Agency.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim yang tugas dan fungsi sebagai pendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dalam peningkatan pendapat daerah secara optimal. Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim yaitu melaksanakan fungsi menunjang urusan pemerintah di bidang pajak daerah, bidang penerimaan bukan pajak daerah, perencanaan, pembinaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Pada kondisi pandemi Covid-19 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berusaha merealisasikan anggaran sebaik mungkin dengan melihat beberapa faktor yang justru merugikan daerah sehingga diperlukan strategi tepat dan nyata bagi pengelolaan anggaran di tahun 2020 - 2021. Pada tahun anggaran 2021 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur surplus keuangan daerah mencapai Rp 2 triliun. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani, surplus keuangan daerah ini diperoleh dari DBH (dana bagi hasil), dana alokasi khusus (DAK) non fisik dan pendapatan asli daerah (PAD). DBH merupakan alokasi dana kurang salur atau anggaran kurang bayar dari pemerintah pusat dibayarkan setelah perubahan APBD (Kaltimprov.go.id, 2021).

DAK non fisik disalurkan sebesar Rp 478 miliar oleh pemerintah pusat. Ditambah PAD surplus sebesar Rp 592 miliar. Terkait surplus PAD, Sa'bani apresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang telah melakukan relaksasi (keringanan pembayaran PKB), sehingga mampu mendongkrak PAD dari

sektor pajak daerah. setelah *refocusing* anggaran karena pandemi ada pemangkasan atau perubahan perkiraan pendapatan. Sehingga pada tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi masyarakat. Diakui Kepala Bapenda Kaltim Hj. Ismiati, kebijakan Pemprov Kaltim ini menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di berbagai daerah di Kaltim (Kaltimprov.go.id, 2021).

Ismiati (2021) menyebutkan relaksasi PKB tahun ini sama besarnya dengan tahun 2020, yakni diskon PKB 10 persen hingga 30 persen. Sedangkan diskon bea balik nama (BBNKB) ke-2 sama masih 40 persen. Pemanfaatan Pergub Relaksasi PKB Tahun 2020, Ismiati menjelaskan untuk masa pajak tahun berjalan sebanyak 1.021.050 unit kendaraan dengan total PKB sebesar Rp 725,5 miliar Sementara pemanfaatan dari wajib pajak yang menunggak pajak 2 tahun hingga 5 tahun sebanyak 87.254 unit kendaraan dengan total PKB Rp 128,8 miliar. Secara keseluruhan, pemanfaatan Pergub Relaksasi PKB tahun 2020 sebanyak 1.109.304 unit dengan total PKB Rp 854,37 miliar. Selain itu, penerimaan dari PKB baru sebanyak 104.834 unit dengan nilai Rp90.082 miliar. Untuk total penerimaan PKB, baik baru maupun PKB dari relaksasi sebanyak 1.212.838 unit kendaraan dengan total PKB Rp944,45 miliar. Ditambahkannya, BBNKB realisasi Rp751 miliar dari target Rp 650 miliar. Sehingga dengan adanya program ini pajak daerah Kaltim surplus Rp 506 miliar lebih (Kaltimprov.go.id, 2021).

Berdasarkan hal tersebut maka *Value for Money* sangatlah penting dalam melihat keuangan *sector public*. *Value for Money* adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi atau proyek tertentu. Dalam konteks Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), fenomena realitas *Value for Money* dapat mencerminkan bagaimana organisasi tersebut menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Ada beberapa aspek yang dapat dari fenomena ini dan menjadi pertimbangan dalam menganalisis *Value for Money* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim antara lain masih dinilai kurang didalam melakukan efisiensi pengelolaan sumber daya. Efisiensi berhubungan dengan sejauh mana badan pendapatan daerah menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hal ini meliputi penggunaan anggaran dengan bijaksana, pengelolaan waktu yang efektif, dan penggunaan tenaga kerja yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Diperlukan Efektivitas pencapaian tujuan. Efektivitas berfokus pada sejauh mana Badan Pendapatan Daerah Kaltim dapat mencapai tujuan strategisnya. Misalnya, dalam hal ini, tujuan Badan Pendapatan Daerah mungkin termasuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan ini tercapai. dan terakhir terutama pada aspek pengawasan dan pencegahan korupsi ini memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu diterapkan untuk memastikan integritas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Maka dari itu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim harus secara terus-menerus melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa

pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan prinsip *Value for Money*. Dengan demikian, sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tidak dapat dipungkiri kinerja anggaran ditengah Virus Covid-19 menjadi sebuah faktor menentukan terciptanya pengelolaan yang baik dan optimal dan jelaslah program diatas tidak terlepas dari beberapa pengaruh nyata bagi pengelolaan anggaran daerah Kaltim seperti akuntabilitas public yang baik, transparansi terhadap public yang nyata diberikan kepada masyarakat dan partisipasi serta pengawasan yang dilakukan juga berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul “Anteseden *Value for Money* Pada Kinerja Keuangan Sektor Publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim

KAJIAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

Keuangan Publik atau Public Finance

Keuangan publik (*public finance*) merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit (Musgrave, 2008). Dalam pandangan lain, Rosen & Gayer, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Karena itu, deinisi di atas menjadikan istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor public (Rosen & Gayer, 2008). Dalam pandangan Rossen, “*public finance is the branch of economics that studies the taxing and spending activities of government*” (keuangan publik merupakan cabang ekonomi yang mengkaji aktivitas perpajakan dan pengeluaran pemerintah) (Rosen & Gayer, 2008). Isu-isu penting dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan meskipun berhubungan dengan aspek keuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber-sumber riil. Kajian public finance menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif menekankan isu-isu dengan fungsi-fungsi mikroekonomi pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan dan mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan. Pada bagian penting lainnya, fungsi makroekonomi pemerintah terkait dengan penggunaan pajak, pengeluaran, dan kebijakan moneter yang pada tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga.

Keuangan publik merupakan studi tentang intervensi pemerintah dalam mengatur pasar (*market place*) (Rosen & Gayer, 2008). Dengan pandangan yang berbeda, menurut orientasi aliran Continental, keuangan publik merupakan studi tentang bagaimana masyarakat berpartisipasi melalui institusi politik dan fiskal untuk mencapai pola-pola dan tujuan-tujuan fiskal. Pengertian keuangan publik menurut aliran *Continental* ini diikuti pula oleh Buchanan (Rosen & Gayer, 2008). Istilah *public finance* untuk kajian ekonomi di Indonesia biasanya menggunakan istilah ilmu keuangan negara. Dalam pandangan Soetrisno (2014) ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari atau menela’ah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara. Sedangkan dalam pandangan M. Suparmoko (2003) ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang

ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh- pengaruhnya di dalam perekonomian tersebut (Suparmoko, et al, 2003).

Manajemen Keuangan Sektor Publik

Manajemen keuangan publik adalah semua kegiatan/upaya/aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola semua urusan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan kebijakan mengadakan pembiayaan. Manajemen keuangan publik dituangkan dalam bentuk anggaran keuangan publik. Menurut Mardiasmo (2013), anggaran keuangan publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan danapublik. Anggaran keuangan publik berisi rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Bastian, 2010). Anggaran keuangan publik dapat didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu: perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan pada periode yang akan datang dan rencana penjabatan sumber daya yang dinyatakan dalam angka (biasanya satuan uang).

Dengan demikian, penganggaran keuangan publik adalah proses pelaksanaan program-program dalam bentuk pendapatan dan belanja dalam satuan moneter yang didanai dengan uang masyarakat. Artinya, anggaran keuangan publik dibuat untuk menentukan tingkat kebutuhan masyarakat yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Ada dua jenis anggaran keuangan publik sesuai tingkat pemerintahan yaitu: (1) anggaran negara (APBN) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR dan (2) anggaran daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan. Artinya Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2013) adalah sebagai berikut: Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melakukan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) Hak untuk tahu (*right to know*), 2) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) Hak untuk didengan aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar

melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada masyarakat luas.”

Pengertian akuntabilitas public menurut Lukito (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja. Pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2015) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (*principal*).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas publik yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan memiliki arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*.

Partisipasi Anggaran

Menurut Nurcahyani & Syafruddin (2010) Partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. Seperti yang dikemukakan Kartika (2010) agar dalam proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat manajemen, proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan *sense of commitment* dalam diri penyusunnya. Proses penyusunan anggaran yang tidak berhasil menanamkan *sense of commitment* dalam diri penyusunnya akan berakibat anggaran yang disusun hanyalah sekedar sebagai alat perencanaan belaka, yang jika terjadi penyimpangan antara realisasi dengan anggaran tidak satupun manajer yang merasa tanggung jawab.

Partisipasi anggaran adalah tahap partisipasi pengurus dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat petanggungjawaban. Partisipasi merupakan keikutsertaan dalam mempersepsikan tentang pengembangan, yang mencakup penjelasan anggaran tahunan atau periode lainnya pada departemennya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap peran individu tersebut (Saraswati & Aisyah, 2015).

Transparansi

Definisi Transparansi menurut Tarigan & Nurtanzila, (2013) sebagai

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut maka transparansi merupakan keterbukaan atas semua informasi dan tidak boleh ada hal yang dirahasiakan atau disembunyikan. Informasi yang disampaikan harus dapat dipercaya dengan disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Indikator Transparansi Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi adalah bentuk kemudahan dalam mengakses informasi, penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai prosedur-prosedur, biaya dan tanggungjawab, menyusun mekanisme alur pengaduan (Adiwirya and Sudana, 2015).

Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memberi dorongan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Busro, 2018). Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri (Busro, 2018).

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Indikator pengawasan adalah perencanaan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, pertanggung jawaban dan tujuan. (Fernandes & Hanif, 2015).

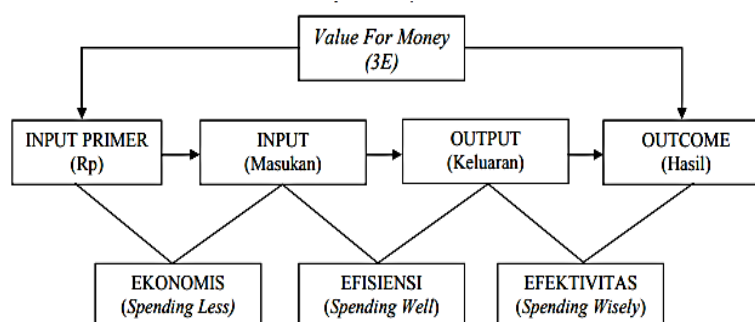
Kinerja Anggaran berbasis *Value for Money*

Bastian (2010) bahwa anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu. anggaran didefinisikan: Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi

perubahan sumber-sumber penerimaan. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Menurut Mahmudi, (2015) menyatakan bahwa *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *Value for Money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektifitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal, serta efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran. *Value for Money* merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsurunsurnya merupakan satu kesatuan dari input, output, dan outcome. Kegagalan organisasi sektor publik untuk mendapatkan input dari pada harga yang semestinya menyebabkan tidak terpenuhinya indikator ekonomi. Selanjutnya, input yang terlalu mahal akan mengakibatkan efisiensi yang pada akhirnya akan mengarah pada ketidak efektifnya pencapaian program secara keseluruhan.



Gambar 1. Value for Money secara skematis

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (Mahmudi, 2015), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah:

- 1) **Ekonomi:** konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar.
- 2) **Efisiensi:** efisien terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau istilah lain output per unit input.
- 3) **Efektivitas:** efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

Good Government Governance (GGG)

Penerapan *Good Government Governance* (GGG) dapat membantu aparaturnya pemerintah dalam pengambilan keputusan yang efektif yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara agent dan principal sehingga dapat meminimalkan resiko kesalahan pengambilan keputusan dan penyalahgunaan wewenang sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan asumsi teori keagenan yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989) salah satunya adalah asumsi tentang sifat manusia yang bertindak oportunistik. Dengan adanya penerapan *Good Government Governance* (GGG) pada suatu organisasi akan mampu meminimalkan sifat oportunistik dari para manajemen sehingga berdampak pada perbaikan kinerja organisasi. Hubungan atau kontrak masih terjadi masalah agensi yang timbul karena adanya asimetri informasi antara agent dan principal.

Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance* (GGG). Rahmatika & Afiah, (2014) menyebutkan bahwa dengan melaksanakan *Good Government Governance* (GGG), salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkatkan kinerja melalui tercapainya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik. Ini menandakan bahwa konsep *Good Government Governance* (GGG) mengacu pada seperangkat prinsip, nilai, dan praktik yang berfokus pada tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Konsep ini berupaya menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berkeadilan.

Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money

Lembaga-lembaga/organisasi sektor publik diwajibkan untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) dan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) karena hal ini merupakan suatu tuntutan akuntabilitas. Akuntabilitas mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja anggaran yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kinerja anggaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Fernandes & Hanif, 2015). Pertiwi (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berbasis *Value for Money*. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) adalah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*

Partisipasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money

Konteks penganggaran, permasalahan pengukuran kinerja mencakup berbagai macam aspek yang mampu memberikan informasi yang efektif dan efisien terhadap pencapaian kinerja tidak terbatas pada permasalahan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, penerapan partisipasi pada organisasi sangat penting guna menyamakan persepsi antara pimpinan dan karyawan (Premananda & Latrini, 2017). Karyawan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam proses anggaran yang menunjukkan adanya interaksi yang baik antara pimpinan dan karyawan.

Premananda & Latrini (2017) menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran berbasis *Value for Money*. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) adalah Partisipasi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*

Transparansi Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

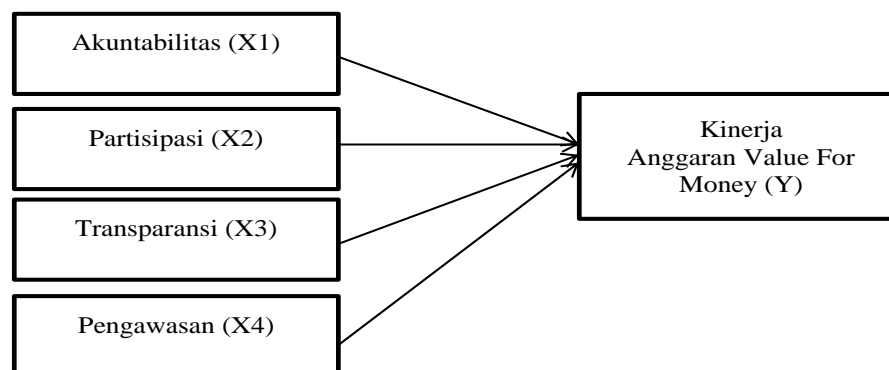
Adanya kebijakan dan kemudahan akses informasi yaitu aspek dari transparansi yang dapat menjangkau setiap aspek kebijakan. Keterbukaan dan kebebasan dalam memperoleh informasi merupakan aspek dasar dari transparansi. Artinya, secara langsung masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasaribu, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada pengelolaan keuangan daerah dan didukung oleh penelitian Adiwirya & Sudana (2015) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada kinerja anggaran berbasis *Value for Money*. Fernandes (2015), yang menyatakan bahwa transparansi (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran yang berkonsep *Value for Money* untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan. Kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik. Dengan demikian hipotesis pertama (H3) adalah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*

Pengawasan Berpengaruh Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*

Pengawasan merupakan suatu sarana untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Pengawasan juga merupakan bentuk antisipasi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan sehingga kegiatan atau aktivitas pemerintah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Berdasarkan dari peneliti yang dilakukan oleh Wandari *et al.*, (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel pengawasan terhadap variabel kinerja anggaran pemerintah dengan basis *Value for Money* dan didukung oleh penelitian Hanafiah *et al.*, (2016) bahwa pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) adalah Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money*.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teoretik dan empirik yang telah dikemukakan sebelumnya, maka disusun kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Dengan Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan Angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan kepada responden untuk dijawabnya. Skala yang digunakan dalam penelitian ini skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala Likert memiliki dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif. Untuk pernyataan positif, masing-masing kategori jawaban diberi skor sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Likert

Sangat Setuju(SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode PLS-SEM. Kemudian data ini dikelompokkan berdasarkan jawaban yang sama, PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2013) , pendekatan PLS adalah *distribution free* (tidak menghasilkan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, ordinal, interval dan rasio). Menurut Ghazali (2013) PLS merupakan *factor indeterminacy* metode analisis yang *powerful* oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu dan jumlah sampel kecil. PLS digunakan untuk mengkonfirmasi teori, jika dibandingkan dengan covariant based SEM, komponen yang berdasarkan PLS mampu menghindarkan

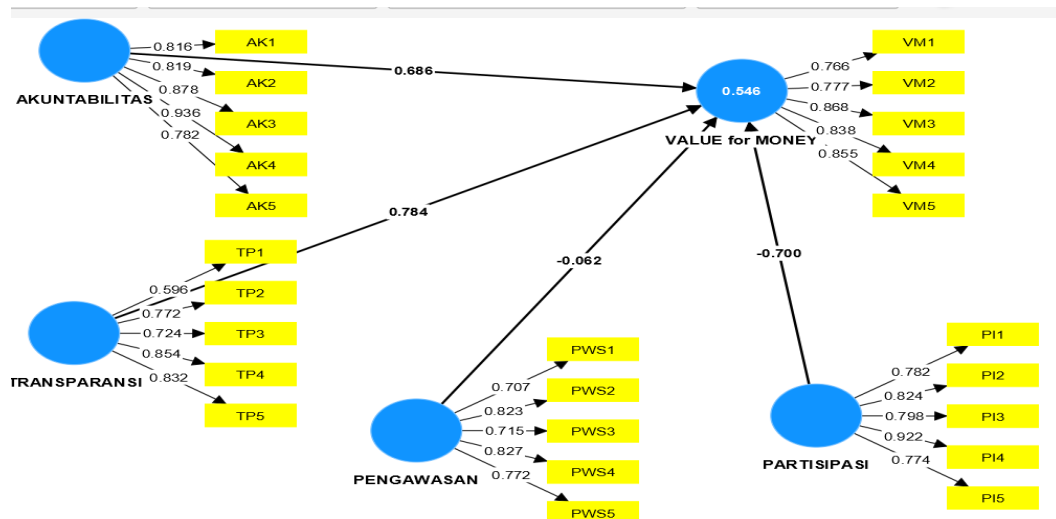
dua masalah besar yang dihadapi oleh covariance based SEM. Perbedaan antara covariance based SEM dengan component based PLS adalah apakah kita akan menggunakan model persamaan struktural untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi. Dan teknik sampling yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Adapun teknik untuk menentukan jumlah sampel dapat menggunakan Rumus Slovin. Dari perhitungan jumlah Populasi 224 Pegawai maka diperoleh hasil sebesar sampel menggunakan rumus slovin dengan margin eror 10 persen atau 0,1 yaitu dengan hasil 69,13. Dikarenakan untuk memenuhi syarat signifikansi lebih besar untuk mempengaruhi antar variabel menggunakan PLS-SEM maka diambil 100 sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pertama yakni evaluasi measurement outer model atau model pengukuran, selanjutnya evaluasi terhadap model struktural atau inner model dan tahap ketiga dalam analisis PLS yaitu pengujian pada hipotesis penelitian. Outer model terdiri dari hubungan antara item-item variabel yang dapat diobservasi, dan konstruk laten yang diukur dengan masing-masing item, sedangkan inner model terdiri dari konstruk laten yang tidak dapat diobservasi. Pada pengujian ini juga dilakukan estimasi koefisien jalur yang mengidentifikasi kekuatan dari hubungan antara variabel independen dan dependen. Analisis statistika inferensial secara rinci dapat diuraikan.

Evaluasi Measurement (*Outer*) Model Perhitungan Awal

Evaluasi pengukuran outer model dapat dilihat berdasarkan hasil nilai *convergent validity*, discriminant validity dan composite reliability yang secara rinci dapat dilihat pada gambar 2 dan di uraikan dan adapun berdasarkan hasil perhitungan awal PLS Algorithm yang ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil perhitungan awal PLS Algorithm

Sumber : Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Convergent validity dan Discriminate Validity

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SmartPLS yang ditunjukkan pada Tabel 2 bahwa mayoritas indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *loading factor* yang lebih besar dari 0,70 dan dikatakan valid. Selain itu ada 1 indikator yang memiliki nilai *loading factor* kurang dari 0,70 yaitu pada variabel Transparansi pada indikator TP1 menunjukkan 0.596. Hal ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai *loading factor* lebih besar dari 0,70 memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga memenuhi *convergent validity*. Sedangkan indikator variabel yang memiliki nilai *loading factor* lebih kecil dari 0,70 memiliki tingkat validitas yang rendah sehingga indikator variabel tersebut perlu dieliminasi atau dihapus dari model. Nilai *loading factor* setelah indikator TP1 dieliminasi. Adapun hasil perhitungan Outer Loading sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Outer loading awal.

	AKUNTABILITAS	PARTISIPASI	PENGAWASAN	TRANSPARANSI	VALUE for MONEY
AK1	0.816				
AK2	0.819				
AK3	0.878				
AK4	0.936				
AK5	0.782				
PI1		0.782			
PI2		0.824			
PI3		0.798			
PI4		0.922			
PI5		0.774			
PWS1			0.707		
PWS2			0.823		
PWS3			0.715		
PWS4			0.827		
PWS5			0.772		
TP1				0.596	
TP2				0.772	
TP3				0.724	
TP4				0.854	
TP5				0.832	
VM1					0.766
VM2					0.777
VM3					0.868
VM4					0.838
VM5					0.855

Sumber : Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Average Variance Extracted (AVE)

Selanjutnya, Metode lain dengan cara membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap variabel laten dengan korelasi antar variabel laten lainnya dalam model. Jika *square root of average variance extracted* (AVE) variabel laten lebih besar dari korelasi dengan seluruh variabel laten lainnya

maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0,50.

Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE)

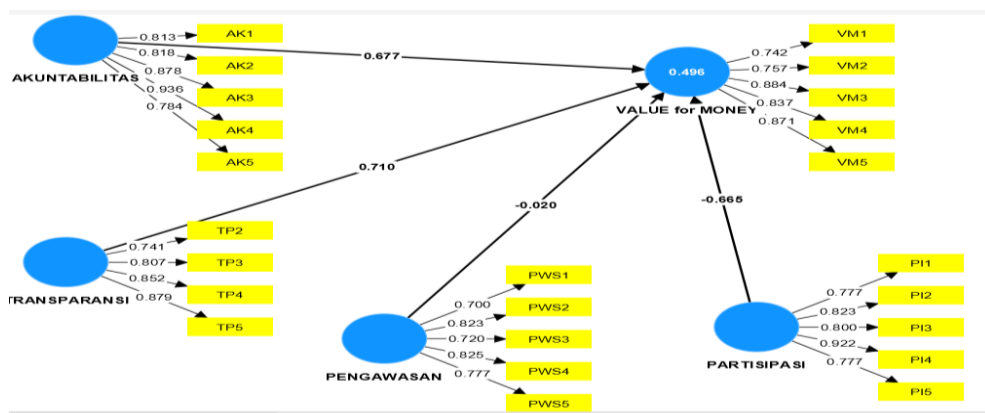
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
AKUNTABILITAS	0.902	0.920	0.927	0.719
PARTISIPASI	0.883	0.877	0.912	0.675
PENGAWASAN	0.832	0.856	0.879	0.594
TRANSPARANSI	0.812	0.823	0.871	0.579
VALUE for MONEY	0.881	0.893	0.912	0.676

Sumber: Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Perhatikan tabel 3 Berdasarkan hasil perhitungan AVE menurut PLS bahwa korelasi antar variabel laten lainnya dalam model ini dikatakan baik dan telah memenuhi syarat sehingga ini dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Sedangkan untuk Dari hasil output SmartPLS menunjukan pada nilai composite reliability untuk semua kontrak berada diatas nilai 0,70. Dengan nilai yang dihasilkan tersebut, semua kontrak memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai mininum yang telah disyaratkan. Berdasarkan hasil perhitungan sementara bahwa menurut pengujian menggunakan aplikasi PLS SEM menyatakan Nilai AVE memiliki nilai yang baik dan telah memenuhi persyaratan didalam pengujian hipotesis. Namun pada aspek *outer loading factor* masih ada satu indikator yang harus di eliminasi sehingga diperlukan perhitungan kedua.

Evaluasi Measurement (Outer) Model Perhitungan Kedua

Berdasarkan perhitungan awal maka peneliti melakukan perhitungan kedua untuk menguji kembali secara keseluruhan apakah semua data yang dikumpulkan telah memenuhi persyaratan. adapapun sebagai berikut hasil dari perhitungan kedua yang telah dilakukan menggunakan PLS SEM setelah indikator yang tereliminasi tersebut dihilangkan:



Gambar 4. Penghitungan kedua PLS Algorithm

Sumber : Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Convergent validity

Validitas konvergen dari model pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif dinilai berdasarkan hubungan antar *component score* dengan *construct score*. Tabel 3 merupakan hasil dari nilai *loading factor* nilai konvergen dari setiap indikator. Nilai *loading factor* > 0,7 dapat dinyatakan valid dan berkorelasi dengan konstruk yang diukur, namun menurut Ghozali (2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan, skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dapat dijabarkan melalui tabel dibawah ini pengukuran nilai loading masing masing variabel yang diujikan sebagai berikut:

Tabel 4. Outer loading Perhitungan Kedua

	AKUNTABILITAS	PARTISIPASI	PENGAWASAN	TRANSPARANSI	VALUE for MONEY
AK1	0.813				
AK2	0.818				
AK3	0.878				
AK4	0.936				
AK5	0.784				
PI1		0.777			
PI2		0.823			
PI3		0.800			
PI4		0.922			
PI5		0.777			
PWS1			0.700		
PWS2			0.823		
PWS3			0.720		
PWS4			0.825		
PWS5			0.777		
TP2				0.741	
TP3				0.807	
TP4				0.852	
TP5				0.879	
VM1					0.742
VM2					0.757
VM3					0.884
VM4					0.837
VM5					0.871

Sumber : Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini yang terdapat 5 konstruk dengan jumlah indikator pertanyaan 25 dan telah tereliminasi satu indikator menjadi 24 item dengan skala 1 sampai 5. diketahui bahwa semua nilai *loading factor* dari

indikator Akuntabilitas (X1) , Partisipasi (X2) , Pengawasan (X3) , Transparansi (X4) , *Value for Money* (Y1) dinilai memadai.

Discriminate Validity

Pengujian discriminant validity dilakukan untuk membuktikan apakah suatu konstruk akan memiliki *loading factor* terbesar pada konstruk yang dibentuknya dari pada *loading factor* dengan konstruk yang lain. Indikator dinyatakan valid jika nilai loading pada konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan nilai loading dengan konstruk lain Hussein, (2015). Berikut adalah sajian data cross loading pada tabel berikut:

Tabel 5. Cross Loading

	AKUNTABILITAS	PARTISIPASI	PENGAWASAN	TRANSPARANSI	VALUE for MONEY
AK1	0.813	0.715	0.451	0.144	0.240
AK2	0.818	0.747	0.521	0.330	0.251
AK3	0.878	0.746	0.484	0.258	0.181
AK4	0.936	0.792	0.465	0.306	0.318
AK5	0.784	0.627	0.410	0.303	0.336
PI1	0.678	0.777	0.538	0.196	0.167
PI2	0.723	0.823	0.602	0.421	0.204
PI3	0.728	0.800	0.520	0.322	0.036
PI4	0.778	0.922	0.583	0.438	0.187
PI5	0.635	0.777	0.532	0.446	0.212
PWS1	0.355	0.432	0.700	0.244	0.264
PWS2	0.408	0.488	0.823	0.601	0.353
PWS3	0.403	0.480	0.720	0.505	0.166
PWS4	0.524	0.686	0.825	0.518	0.229
PWS5	0.439	0.580	0.777	0.564	0.255
TP2	0.345	0.433	0.585	0.741	0.502
TP3	0.205	0.269	0.409	0.807	0.413
TP4	0.231	0.386	0.551	0.852	0.504
TP5	0.273	0.406	0.519	0.879	0.561
VM1	0.323	0.277	0.279	0.379	0.742
VM2	0.292	0.222	0.287	0.403	0.757
VM3	0.264	0.155	0.262	0.586	0.884
VM4	0.189	0.083	0.209	0.399	0.837
VM5	0.294	0.219	0.369	0.644	0.871

Sumber : Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Berdasarkan dari hasil pengolahan data dengan perhitungan kedua bahwa SmartPLS yang ditunjukkan pada tabel 4 bahwa mayoritas indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *loading factor* atau cross loading yang lebih besar dari 0,70 ini menandakan bahwa indikator yang mengukur

variable Akuntabilitas, Partisipasi, Pengawasan, Transparansi serta *Value for Money* dikatakan valid.

Average Variance Extracted (AVE)

Sedangkan untuk nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap variabel laten dengan korelasi antar variabel laten lainnya dalam model. Jika *square root of average variance extracted* (AVE) variabel laten lebih besar dari korelasi dengan seluruh variabel laten lainnya maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik. Direkomendasikan nilai pengukuran harus lebih besar dari 0,50. Artinya jika melihat pada tabel dibawah ini tabel 5 nilai AVE setiap variable memiliki nilai yang diisyaratkan dan memenuhi pengujian.

Tabel 6. Perhitungan kedua average variance extracted (AVE)

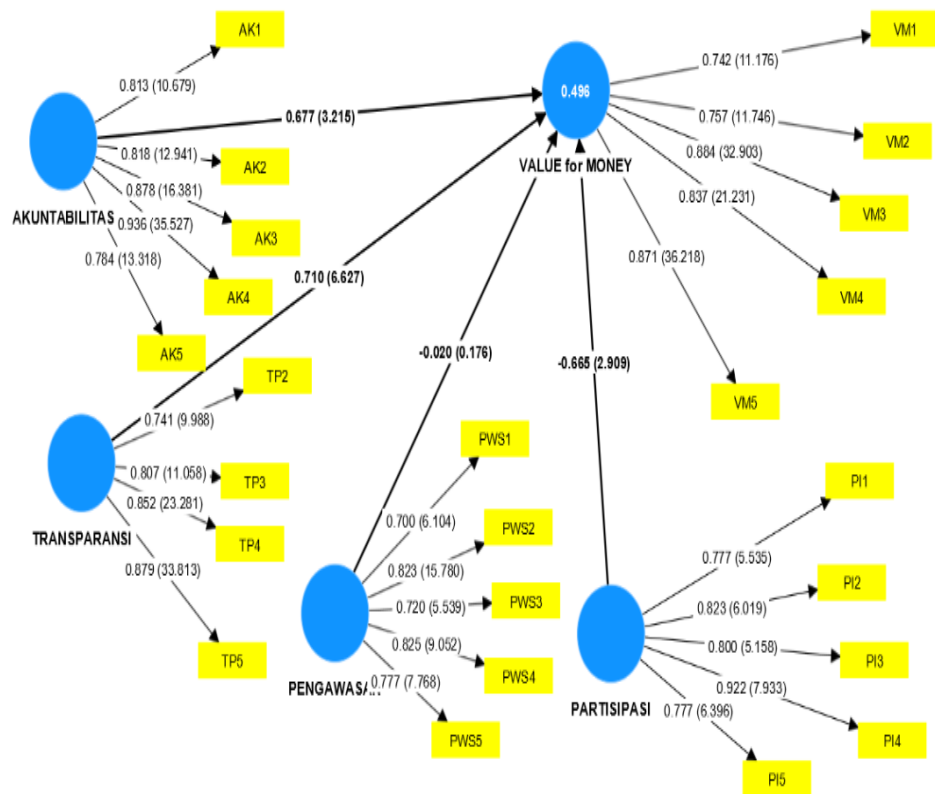
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
AKUNTABILITAS	0.902	0.921	0.927	0.718
PARTISIPASI	0.883	0.881	0.912	0.675
PENGAWASAN	0.832	0.858	0.879	0.594
TRANSPARANSI	0.838	0.846	0.892	0.674
VALUE for MONEY	0.881	0.911	0.911	0.673

Sumber : Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan kedua maka pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui hasil pengujian Evaluasi Inner Model dengan melakukan pengujian hasil Boosstraping menggunakan PLS SEM 4.0. Hasil perhitungan ini nantinya akan menentukan ada atau tidaknya pengaruh antar variabel.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian Inner Model (model struktural) yang meliputi output r-square, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (Partial Least Square) 4.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari hasil bootstrapping. Rules of thumb yang digunakan pada penelitian ini adalah t-statistik >1,96 dengan tingkat signifikansi p-value 0,05 (5%) dan koefisien beta bernilai positif. Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan melalui perhitungan, untuk hasil model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Hasil Bootstrap PLS-SEM

Sumber: Hasil olahan data SmartPLS (2020)

R-Square (R2)

Nilai R-Square (R2) berfungsi untuk menguji model struktural dengan melihat nilai R-Square (R2) yang merupakan uji goodness –fit model. Kekuatan prediksi dapat dilihat dengan menggunakan kriteria R-Square 0,67 kuat; 0,33 moderate ; 0,19 lemah Ghazali dan Latan (2015:81).

Tabel 7. Nilai R-square

	R -Square	R –Square adjusted
Value for Money	0.496	0.475

Sumber : Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Berikutnya R-square variabel *Value for Money* bernilai 0.475. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman variabel *Value for Money* mampu dijelaskan oleh variabel Akuntabilitas, Partisipasi, Pengawasan serta Transparansi sebesar 48 %, atau dengan kata lain Akuntabilitas, Partisipasi, Pengawasan serta Transparansi terhadap *Value for Money* terindikasi Moderate.

Model fit (Q2)

Selanjutnya, Untuk mengetahui besarnya inner model dapat dilihat dari besarnya Q2 dari masing-masing variabel endogen yaitu variabel yang keragamannya dipengaruhi oleh variabel lain, yang sifatnya bisa hanya dipengaruhi

saja (dependen). Menurut Jaya dan Sumertajaya (2008) Goodness of Fit Model diukur menggunakan R-square variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi, Q-Square predictive relevance untuk model struktural, mengukur sebesar baik nilai konservasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

Besaran Q2 memiliki nilai dengan rentang $0 < Q^2 < 1$. Atau Nilai NFI mulai 0 – 1 diturunkan dari perbandingan antara model yang dihipotesiskan dengan suatu model independen tertentu. Model mempunyai kecocokan tinggi jika nilai mendekati 1. Berdasarkan tabel dibawah nilai NFI berada pada 0.472 yang berarti memiliki kecocokan model yang dapat dinyatakan baik. (Ghozali, 2014)

Tabel 8. Model Fit

	Saturated model	Estimated model
NFI	0.472	0.472

Sumber: Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Pengujian Hipotesis Penelitian Langsung (Path coefficient)

Selanjutnya, Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel masing - masing. Setiap hubungan yang dihipotesiskan akan melalui simulasi menggunakan metode bootstrapping. Metode bootstrapping dimaksudkan untuk meminimalisir masalah data penelitian yang tidak normal. Hasil pengujian melalui metode bootstrapping dilihat dari Path Coefficient adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Langsung (Path coefficient)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
AKUNTABILITAS → VALUE for MONEY	0.677	0.617	0.210	3.215	0.001
PARTISIPASI → VALUE for MONEY	-0.665	-0.585	0.228	2.909	0.004
PENGAWASAN → VALUE for MONEY	-0.020	-0.018	0.116	0.176	0.860
TRANSPARANSI → VALUE for MONEY	0.710	0.713	0.107	6.627	0.000

Sumber: Hasil olahan data SmartPLS (2022)

Terdapat nilai pada output result for inner weight yang memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel – variabel penelitian pada dasarnya dalam pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t-tabel dan t-statistik. t-tabel dapat diperoleh dari jumlah 100 responden dengan nilai signifikansi 0,05 dan nilai t-tabel 1,96. Adapaun hasil pengujian bootstrapping diatas menunjukan bahwa:

Pengujian Hipotesis (H1)

Hipotesis Pertama menguji Variabel akuntabilitas secara positif berpengaruh terhadap *Value for Money*. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Akuntabilitas terhadap *Value for Money* sebesar 0,677 dan t-statistik yaitu sebesar 3,215 dan p Value 0,001. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik dan pvalue signifikan. karena t-statistik >1,96 dengan pvalue <0,05, sehingga hipotesis

pertama diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan PLS SEM maka ditemukan adanya pengaruh positif antara variabel akuntabilitas terhadap *Value for Money*. Ini dibuktikan dengan hasil penjabaran diatas maka terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas (AK1, AK2, AK3, AK4, AK5) dengan *Value for Money* (VM1, VM2, VM3, VM4, VM5). Nilai t-statistik yang tinggi (10.679 - 35.527) menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap *Value for Money* sangat signifikan. Sehingga peneliti menjustifikasi bahwa hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas dapat berkontribusi dalam meningkatkan *Value for Money* di Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Kaltim. Ketika organisasi lebih akuntabel, anggaran dan sumber daya dapat dikelola dengan lebih efisien dan efektif. Pengaruhnya variabel ini juga dibuktikan hasil analisis dengan nilai Original Sample (O): 0.677, Rata-rata atau Sample Mean (M): 0.617, Standard Deviation (STDEV): 0.210, T statistics: 3.215, P value: 0.001.

Berdasarkan hal ini maka variabel Akuntabilitas yang baik memastikan keterbukaan atau transparansi dalam penggunaan anggaran publik dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk melacak pengeluaran dan hasilnya. Dengan demikian, akuntabilitas membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana publik dan mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik. Dengan menumbuhkan budaya transparansi dan pertanggungjawaban, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan, akuntabilitas yang baik berperan penting dalam mencapai *Value for Money*. Akuntabilitas mempengaruhi variabel dependen yaitu kinerja anggaran yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kinerja anggaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Fernandes & Hanif, 2015). Pertiwi (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berbasis *Value for Money*. Temuan pada variabel ini menemukan novelty bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Akuntabilitas terhadap kinerja keuangan yang berbasis pada "*Value for Money*" sehingga para pegawai memang diharapkan untuk menekankan pentingnya mencapai hasil yang optimal dari pengeluaran yang dilakukan. Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas semacam ini memanglah mengacu pada tanggung jawab badan pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim untuk mengelola keuangan dengan cara yang efisien, efektif, dan transparan guna mencapai hasil yang maksimal bagi masyarakat. Peneliti menilai bahwa beberapa prinsip dan praktik yang biasanya terkait dengan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan berdasarkan "*Value for Money*": Tidak terlepas dari perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, proses perencanaan dan penganggaran yang baik menjadi dasar untuk mencapai "*Value for Money*".

Pengujian Hipotesis (H2)

Hipotesis Pertama menguji Variabel Partisipasi secara positif berpengaruh terhadap *Value for Money*. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Partisipasi terhadap *Value for Money* sebesar -0,665 dan t-statistik yaitu sebesar 2,909 dan p Value 0,004. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik dan pvalue signifikan. karena t-statistik >1,96 dengan pvalue <0,05, sehingga hipotesis kedua diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan PLS SEM maka ditemukan adanya pengaruh positif antara variabel Partisipasi terhadap *Value for Money*. Ini dibuktikan dengan hasil penjabaran diatas maka terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi (PI1, PI2, PI3, PI4, PI5) dengan *Value for Money* (VM1, VM2, VM3, VM4, VM5). Nilai t-statistik yang tinggi (5.535 - 7.933) menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi terhadap *Value for Money* signifikan. Maka dengan demikian penulis menjustifikasi bahwa Partisipasi aktif pegawai dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan dapat meningkatkan penggunaan sumber daya yang efisien dan mendukung terciptanya *Value for Money* yang lebih baik di Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Kaltim. Ini juga dibuktikan dengan nilai Original Sample (O): -0.665, Sample Mean (M): -0.585, Standard Deviation (STDEV): 0.228, T statistics: 2.909, P value: 0.004.

Berdasarkan hal tersebut maka Partisipasi memainkan peran penting dalam memastikan legitimasi keputusan pengeluaran anggaran publik. Melibatkan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan menciptakan rasa kepemilikan dan penerimaan yang lebih besar terhadap alokasi anggaran yang dilakukan. Ini dapat meminimalkan konflik atau penolakan yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap penggunaan dana publik. Dalam jangka panjang, partisipasi yang baik dapat mempertahankan dukungan masyarakat dan memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, partisipasi masyarakat atau pemangku kepentingan baik pejabat dan pegawai memainkan peran penting dalam meningkatkan *Value for Money*. Melalui partisipasi, kebutuhan yang akurat dapat diidentifikasi, pengawasan yang lebih efektif dapat dilakukan, inovasi dan efisiensi dapat terwujud, serta masyarakat dapat merasa memiliki. Oleh karena itu, penerapan partisipasi pada organisasi sangat penting guna menyamakan persepsi antara pimpinan dan karyawan (Premananda & Latrini, 2017). Karyawan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam proses anggaran yang menunjukkan adanya interaksi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Premananda & Latrini (2017) menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif pada kinerja anggaran berbasis *Value for Money*.

Temuan pada variabel ini menemukan novelty bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Partisipasi terhadap kinerja keuangan berbasis "*Value for Money*". Ini merupakan elemen penting dalam mencapai akuntabilitas yang lebih tinggi. Melibatkan masyarakat atau pegawai dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil menghasilkan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya melalui Forum Anggaran Partisipatif, Mekanisme Pelaporan dan Pengaduan Publik, Keterlibatan dalam Audit Sosial, Kolaborasi dengan Pihak Eksternal.

Pengujian Hipotesis (H3)

Hipotesis Pertama menguji Variabel Pengawasan secara positif berpengaruh terhadap *Value for Money*. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Pengawasan terhadap *Value for Money* sebesar -0,020 dan t-statistik yaitu sebesar 0,176 dan pvalue 0,860. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik dan pvalue tidak signifikan. karena tidak memenuhi syarat t-statistik dan pvalue dengan nilai nilai >1,96 dengan pvalue <0,05, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan PLS SEM maka tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara pengawasan (PWS1, PWS2, PWS3, PWS4, PWS5) dengan *Value for Money* (VM1, VM2, VM3, VM4, VM5). Nilai t-statistik yang rendah dan p-value yang tinggi menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan terhadap *Value for Money* tidak signifikan secara statistik. Sehingga penulis menjustifikasi bahwa hasil ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap *Value for Money* di Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Kaltim. Mungkin perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait mekanisme dan efektivitas pengawasan yang dilakukan. Selain itu juga dibuktikan dengan nilai Original Sample (O): -0.020, Sample Mean (M): -0.018, Standard Deviation (STDEV): 0.116, T statistics: 0.176, P value: 0.860.

Pengawasan yang baik sebenarnya dapat memiliki pengaruh positif terhadap "*Value for Money*" atau nilai yang diperoleh dari pengeluaran yang dilakukan. Pengawasan yang efektif dapat membantu memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan secara efisien, pengeluaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun, terdapat beberapa alasan mengapa pengawasan tidak selalu memberikan pengaruh positif yang diharapkan terhadap "*Value for Money*".

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini yaitu Pertama, Ketidakmampuan atau kurangnya kemauan untuk melakukan tindakan yang diperlukan maksudnya adalah bahwa Pengawasan yang efektif membutuhkan langkah-langkah penegakan yang tegas terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian. Jika tindakan yang diperlukan tidak diambil atau tidak ada konsekuensi yang signifikan atas pelanggaran, pengawasan tersebut tidak akan efektif dan tidak akan mendorong pencapaian "*Value for Money*" yang optimal. Kedua, Kurangnya kompetensi dalam melaksanakan pengawasan ini menandakan bahwa untuk melakukan pengawasan yang efektif, diperlukan keahlian dan pengetahuan yang memadai. Jika petugas pengawasan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang proses, kebijakan, dan praktik yang terlibat, mereka mungkin tidak dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian atau masalah yang mungkin muncul. Ini dapat menghambat upaya untuk mencapai "*Value for Money*".

Ketiga, Keterbatasan sumber daya, Pengawasan yang efektif membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk waktu, tenaga kerja, dan anggaran. Jika sumber daya yang dialokasikan untuk pengawasan terbatas, maka kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berpotensi dapat terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pengawasan dan dampak negatif terhadap "*Value for Money*".

Pengujian Hipotesis (H4)

Hipotesis Pertama menguji Variabel Transparansi secara positif berpengaruh terhadap *Value for Money*. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien beta Transparansi terhadap *Value for Money* sebesar 0,710 dan t-statistik yaitu sebesar 6,627 dan p Value 0,000. Dari hasil ini dinyatakan t-statistik dan Pvalue signifikan. Karena t-statistik >1,96 dengan pvalue <0,05, sehingga hipotesis keempat diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan PLS SEM maka ditemukan adanya pengaruh positif antara variabel transparansi terhadap *Value for Money*. Ini

dibuktikan dengan hasil penjabaran diatas maka terdapat hubungan yang signifikan antara transparansi (TP2, TP3, TP4, TP5) dengan *Value for Money* (VM1, VM2, VM3, VM4, VM5). Nilai t-statistik yang tinggi (6.627 - 36.218) menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap *Value for Money* sangat signifikan. Sehingga penulis menjustifikasi bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan terkait penggunaan sumber daya secara efisien dan akuntabel. Hal ini dapat meningkatkan *Value for Money* di Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Kaltim.

Secara keseluruhan, transparansi memiliki dampak yang signifikan terhadap *Value for Money*. Dengan memastikan akses terbuka terhadap informasi anggaran, pengawasan yang efektif, partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, transparansi membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan dan korup. Adanya kebijakan dan kemudahan akses informasi yaitu aspek dari transparansi yang dapat menjangkau setiap aspek kebijakan. Keterbukaan dan kebebasan dalam memperoleh informasi merupakan aspek dasar dari transparansi. Artinya, secara langsung masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasaribu, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *Value for Money* pada pengelolaan keuangan daerah dan didukung oleh penelitian Adiwirya & Sudana (2015) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada kinerja anggaran berbasis *Value for Money*. Fernandes (2015), yang menyatakan bahwa transparansi (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran yang berkonsep *Value for Money* untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan. Kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik.

Sehingga pada temuan pada variabel ini menemukan novelty bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan Transparansi dalam kinerja keuangan berbasis "*Value for Money*" ini memastikan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik yang membuat transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana dana publik digunakan, apakah hasil yang diharapkan tercapai, dan apakah pengeluaran tersebut memperoleh nilai yang optimal. Misalnya dengan cara melakukan Publikasi Laporan Keuangan, Informasi Program dan Proyek, Akses Terbuka ke Data Keuangan, Audit Independen. Ini menandakan bahwa Dengan menerapkan transparansi dalam kinerja keuangan berbasis "*Value for Money*", badan pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat

Pengujian Hipotesis Penelitian Dominan

Variabel eksogen yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel endogen dapat diketahui melalui total coefficient yang paling besar tanpa memperhatikan tanda koefisien positif atau negatif, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10. Pengujian Variabel Dominan

Variabel Eksogen Terhadap Endogen	Total Coefficient
Akuntabilitas -> <i>Value For Money</i>	0.677
Partisipasi -> <i>Value For Money</i>	-0.665
Pengawasan -> <i>Value For Money</i>	-0.020
Transparansi -> <i>Value For Money</i>	0.710

Sumber: Dikelola Penulis menggunakan aplikasi PLS SEM 4. (2022)

Hasil analisis menginformasikan variabel yang memiliki total coefficient terbesar terhadap variabel *Value for Money* adalah variabel Transparansi dengan total coefficient sebesar 0.710. Dengan demikian Transparansi merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap *Value for Money*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul “Anteseden *Value for Money* pada Kinerja Keuangan Sektor Publik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim” dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Berdasarkan hasil perhitungan atau pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima dan memiliki pengaruh langsung terhadap *Value for Money*. Ini menandakan bahwa semakin baik Akuntabilitas yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diberikan semakin baik kinerja keuangan berbasis *Value for Money* akan menjadi meningkat dan terbentuk.
2. Berdasarkan hasil perhitungan atau pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima dan memiliki pengaruh langsung terhadap *Value for Money*. Ini menandakan bahwa semakin baik Partisipasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diberikan semakin baik kinerja keuangan berbasis *Value for Money* akan menjadi meningkat dan terbentuk.
3. Berdasarkan hasil perhitungan atau pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Ini dikarenakan bahwa pengawasan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur masih Pertama, Ketidakmampuan atau kurangnya kemauan untuk melakukan tindakan, Kedua, Kurangnya kompetensi dalam melaksanakan pengawasan, Ketiga, Keterbatasan sumber daya, dalam aspek pengawasan. Sehingga pengawasan di Badan keuangan ini belum bisa terbentuk.
4. Berdasarkan hasil perhitungan atau pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima. Ini menandakan bahwa Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik membantu menghindari penyalahgunaan dan korupsi. Dengan adanya akses terbuka terhadap informasi anggaran, penggunaan dana publik dapat secara efektif dipantau oleh masyarakat umum, lembaga pengawas, dan media. Ini menciptakan lingkungan akuntabilitas yang mendorong pemangku kepentingan untuk bertindak dengan jujur dan menghindari praktik korupsi yang merugikan *Value for Money*.
5. Terakhir, Berdasarkan hasil perhitungan atau pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Transparansi merupakan variabel yang memiliki pengaruh

paling dominan terhadap *Value for Money*. Ini dikarenakan Variabel ini sangat berpengaruh terhadap variabel lainnya terkhusus dalam memberikan Kinerja Keuangan berbasis *Value for Money*. Ini menandakan bahwa Transparansi memungkinkan adanya pengawasan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran publik. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik mendorong partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dan Transparansi meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan.

Saran

Untuk Penelitian Selanjutnya

Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti kondisi badan keuangan seperti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan Studi Lebih Lanjut tentang Pengaruh Akuntabilitas terhadap *Value for Money*. Meskipun hipotesis pertama diterima, tetapi penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai bagaimana akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara spesifik mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan berbasis *Value for Money*. Penelitian dapat melibatkan analisis lebih rinci tentang praktik akuntabilitas yang paling efektif dalam meningkatkan *Value for Money*.
2. Menyelidiki Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi dalam Badan Pendapatan Daerah. Meskipun hipotesis kedua diterima, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Faktor-faktor seperti motivasi, insentif, dan lingkungan kerja dapat dieksplorasi untuk meningkatkan partisipasi yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan berbasis *Value for Money*.
3. Mengidentifikasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan. Meskipun hipotesis ketiga ditolak, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaan pengawasan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam penelitian ini, perlu untuk mengeksplorasi alasan mengapa pengawasan belum terbentuk dan mengusulkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, seperti peningkatan kompetensi, alokasi sumber daya yang memadai, dan peningkatan kemauan untuk bertindak.
4. Menguji Efek Transparansi terhadap Pencegahan Korupsi. Dalam penelitian lanjutan, perlu untuk menguji secara lebih rinci bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat membantu dalam pencegahan penyalahgunaan dan korupsi. Penelitian ini dapat melibatkan analisis kasus, studi perbandingan dengan Badan Pendapatan Daerah lainnya, dan tinjauan terhadap kebijakan atau praktik yang telah berhasil dalam mendorong transparansi dan mengurangi korupsi.
5. Menyelidiki Pengaruh Transparansi terhadap Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami bagaimana transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Penelitian ini dapat

mencakup studi tentang bagaimana transparansi dapat mendorong partisipasi publik, melibatkan media, dan memperkuat peran lembaga pengawas dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai referensi terhadap hasil penelitian untuk bahan pertimbangan evaluasi kinerja keuangan berbasis *Value for Money* di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperkuat variabel akuntabilitas, partisipasi, pengawasan, dan transparansi terhadap kinerja keuangan berbasis "*Value for Money*" di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Peningkatan Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas: Badan Pendapatan Daerah dapat meningkatkan sistem pelaporan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dilacak secara transparan. Perlu mengadopsi praktik terbaik dalam pembuatan laporan keuangan yang terperinci dan berkualitas, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal.
2. Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Badan Pendapatan Daerah perlu mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, lembaga pengawas, dan media. Hal ini dapat dicapai dengan mengadakan forum diskusi, pertemuan publik, dan memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap informasi keuangan publik.
3. Penguatan Sistem Pengawasan: Badan Pendapatan Daerah harus memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi dalam penelitian. Ini termasuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas tim pengawas, alokasi sumber daya yang memadai, serta mendorong tindakan yang tegas terhadap pelanggaran.
4. Meningkatkan Keterbukaan dan Akses Terhadap Informasi: Badan Pendapatan Daerah perlu memastikan keterbukaan dan akses terhadap informasi anggaran publik. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan transparansi yang kuat, termasuk mempublikasikan anggaran, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.
5. Penguatan Kebijakan dan Praktik Anti-Korupsi: Badan Pendapatan Daerah harus mengadopsi kebijakan dan praktik anti-korupsi yang efektif. Ini melibatkan implementasi langkah-langkah pencegahan korupsi, seperti penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, pemberlakuan kode etik, pelatihan anti-korupsi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M. F., & Sudana, I. P. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611-628.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Busro, M. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media.
- Fernandes, W., Kennedy, K., & Hanif, R. A. (2015). Pengaruh Akuntabilitas,

- Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar (*Doctoral dissertation*, Riau University).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Cetakan ke, 9.
- Hanafiah, R. R., Abdullah, S. A. S., & Saputra, M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(4).
- Kartika, A. (2010). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Dalam Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran (Studi Empirik Pada Rumah Sakit Swasta Di Kota Semarang). *Kajian Akuntansi*, 2(1), 246951.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, M. (2013). Assessing Accountability Of Performance Measurement System And Local Government Budgetary Management. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 4(3), 373-395.
- Musgrave, R. A. (2008). Public finance and three branch model. *Journal of Economics and Finance*, 32, 334-339.
- Nurcahyani, K., & Syafruddin, M. (2010). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening (*Doctoral dissertation*, Universitas Diponegoro).
- Pasaribu, F. J. (2011). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. *Tesis*
- Pertiwi, D. P. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). *Jurnal JOM FEKON*, 2(2): 1-15.
- Premananda, N. L. P. U., & Latrini, M. Y. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 2451-2476.
- Rahmatika, D. N., & Afiah, N. N. (2014). Factors influencing the quality of financial reporting and its implications on good government governance. *International Journal of Buainwaa, Economics and Law*, 5(1), 2289-1552.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2008). *Public finance (internat. ed)*. Boston, Mass.
- Saraswati, G. P., & Aisyah, M. N. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 136-147.

- Soetrisno, A. (2014). The influence of intellectual capital components towards the company performance. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 14(1).
- Suparmoko, M., Ratnaningsih, M., Setyarko, Y., & Widyantara, G. (2003). Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam Laut Dan Pesisir Pulau Kangean. In *Prosiding Seminar Nasional III dan Kongres INREA* (pp. 1-21).
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(1), 29-45.
- Wandari, I. D. N. T., Edy Sudjana & M. P. Adi (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3(1): 1-12.